



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 3255-3264

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Tata Kelola Perusahaan dan Derivatif Keuangan terhadap Penghindaran Pajak

Firda Azkia, Puspita Handayani
Prodi Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
fazkia23@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh konservatisme akuntansi, tata kelola perusahaan, dan derivatif keuangan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor Consumer cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode purposive sampling. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan. Sampel terdiri dari 10 perusahaan selama lima tahun pengamatan, sehingga total data pengamatan sebanyak 50. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan aplikasi EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi dan leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, tata kelola perusahaan yang diprosikan melalui komite audit dan komisaris independen, serta derivatif keuangan, tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci : Konservatisme Akuntansi, Tata Kelola Perusahaan, Komite Audit, Komisaris Independen, Leverage, Derivatif Keuangan, Penghindaran Pajak

1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan. Bagi perusahaan, pajak adalah beban yang dapat mengurangi laba, sehingga mendorong munculnya strategi untuk meminimalkan kewajiban pajak. Salah satu strategi yang digunakan adalah penghindaran pajak (tax avoidance), yaitu upaya legal untuk mengurangi beban pajak berdasarkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan. Meskipun penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,23 triliun atau 108,8% dari target APBN (Kementerian Keuangan, 2023), praktik penghindaran pajak masih menjadi tantangan dalam optimalisasi penerimaan negara. Kasus PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang diduga melakukan praktik transfer pricing menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur kompleks dan hubungan afiliasi lintas negara memiliki peluang besar untuk melakukan penghindaran pajak.

Berbagai faktor diyakini memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, di antaranya adalah konservatisme akuntansi. Prinsip ini mendorong pencatatan pendapatan secara hati-hati dan pengakuan beban secara cepat, sehingga berpotensi menurunkan laba akuntansi yang menjadi dasar pengenaan pajak. Berdasarkan dari penelitian terdahulu menurut (Ellyanti & Suwanti, 2022) & Suwanti, (2022). menyatakan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak). Manajemen perusahaan bisa mencari berbagai strategi untuk menghindarkan pajak, berupa secara menerapkan metode akuntansi yang sifatnya konservatif, dengan niat guna mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Sedangkan menurut (Nadhifah et al., 2024). Bertolak belakang dan menyatakan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan metode akuntansi yang bersifat konservatif tidak serta-merta meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (tax avoidance). Berbagai faktor diyakini memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, di antaranya adalah konservatisme akuntansi. Prinsip ini mendorong pencatatan pendapatan secara hati-hati dan pengakuan beban secara cepat, sehingga berpotensi menurunkan laba akuntansi yang menjadi dasar pengenaan pajak. Berdasarkan dari penelitian terdahulu menurut (Ellyanti & Suwanti, 2022) & Suwanti, (2022). menyatakan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak). Manajemen perusahaan bisa mencari berbagai strategi untuk menghindarkan pajak, berupa secara menerapkan metode akuntansi yang sifatnya konservatif, dengan niat guna mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Sedangkan menurut (Nadhifah et al., 2024). Bertolak belakang dan menyatakan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap

penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan metode akuntansi yang bersifat konservatif tidak serta-merta meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (tax avoidance).

Selain itu, tata kelola perusahaan (corporate governance) juga berperan dalam mengontrol praktik penghindaran pajak. Struktur tata kelola yang kuat, termasuk keberadaan komite audit, komisaris independen, diyakini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, sehingga meminimalkan tindakan oportunistik dalam pengelolaan pajak. Dalam penelitian ini Tata Kelola Perusahaan diprosikan kedalam dua variabel, yaitu komite audit, komisaris independen. Komite audit merupakan bagian integral dari mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif. Penelitian (Purnomo & Bernawati, 2020). menyatakan bahwa komite audit merupakan salah satu fungsi pengawas yang penting dalam perusahaan karena perannya dalam meninjau laporan keuangan, proses audit, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Komite audit juga berkontribusi dalam memperkuat kepercayaan investor dan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Pernyataan ini mencerminkan bahwa komite audit memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem pengawasan yang independen dan objektif guna memastikan bahwa manajemen menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh (Yudhistira & Anggraeni, 2022). menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan (Kasih et al., 2023) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut (Wahyudi & Rustinawati, 2020) . Komisaris independen memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara profesional, etis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Fungsi kontrol yang dijalankan oleh komisaris independen tidak hanya menciptakan keseimbangan kekuasaan antara dewan direksi dan dewan komisaris, tetapi juga mendorong terciptanya keputusan manajerial yang lebih akuntabel dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang perusahaan. Dengan demikian, keberadaan komisaris independen menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola suatu perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Cahyani & Noviari, 2023) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda hal dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rachyu Purbowati, 2021) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut (Wahyudi & Rustinawati, 2020). *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk menjelaskan penggunaan utang untuk membiayai sebagian daripada aktiva perusahaan. *Leverage* tinggi dapat menurunkan beban pajak melalui pengurangan bunga sebagai biaya, namun juga dapat meningkatkan risiko fiskal apabila digunakan untuk menghindari pajak secara agresif. Menurut (Khomsiyah et al., 2021) *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut (Wahyudi & Rustinawati, 2020) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh.

Faktor lain yang juga menjadi perhatian adalah penggunaan derivatif keuangan Menurut (Rosdiani & Hidayat, 2020). derivatif keuangan merupakan kontrak atau perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk membeli atau menjual aset atau komoditas pada waktu dan harga yang telah disepakati. Meskipun derivatif awalnya digunakan sebagai instrumen untuk mengelola risiko keuangan seperti fluktuasi suku bunga, nilai tukar, dan harga komoditas, peraturan perpajakan yang mengatur transaksi derivatif ini masih tergolong lemah dan kerap menjadi bahan perdebatan. Menurut Rosdiani & Hidayat, (2020). Menyatakan bahwa Derivatif Keuangan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan menurut (Luh Nadi & Amelia, 2024). Derivatif Keuangan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh konservatisme akuntansi, tata kelola perusahaan (komite audit, komisaris independen, dan *leverage*), serta derivatif keuangan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor Consumer cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023. Studi ini juga bertujuan untuk mereplikasi dan memperluas penelitian sebelumnya dengan pendekatan dan sektor yang berbeda guna memperoleh hasil yang lebih relevan dan generalisabel.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Agensi

Teori agensi (agency theory) merupakan pendekatan teoritis yang banyak digunakan dalam studi ekonomi, akuntansi, dan manajemen keuangan untuk menjelaskan hubungan antara dua pihak dalam kontrak kerja sama, yaitu prinsipal (pemilik sumber daya atau kepentingan, seperti pemegang saham) dan agen (pihak yang diberi mandat untuk mengelola atau mengoperasikan sumber daya tersebut atas nama prinsipal, seperti manajer atau direksi). Hubungan antara prinsipal dan agen didasari oleh kontrak di mana prinsipal mendelegasikan otoritas kepada agen untuk mengambil keputusan. Namun, karena terdapat perbedaan tujuan dan informasi antara keduanya, sering muncul potensi konflik kepentingan atau masalah keagenan (agency problem). Agen memiliki kecenderungan bertindak demi kepentingan pribadi yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan prinsipal. Menurut Supriyono (2018), hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen melibatkan pemberian wewenang oleh prinsipal kepada agen dalam pengambilan keputusan, dengan harapan keputusan tersebut dapat mengoptimalkan laba perusahaan. Salah satu cara optimalisasi tersebut adalah dengan meminimalkan beban pajak melalui praktik

penghindaran pajak (tax avoidance). Namun, konflik kepentingan tetap berpotensi muncul ketika agen mengambil keputusan demi keuntungan pribadi.

Dalam konteks ini, diperlukan mekanisme pengendalian dan insentif untuk memastikan agen bertindak sesuai dengan tujuan prinsipal. Prinsipal (pemegang saham) biasanya menginginkan peningkatan nilai dan profitabilitas perusahaan, termasuk melalui pengurangan beban pajak. Sebaliknya, agen (manajemen) mungkin mempertimbangkan risiko pribadi, reputasi, atau kepentingan jangka pendek seperti risiko audit atau sanksi dari otoritas pajak.

2.2. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah strategi yang dilakukan oleh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, untuk meminimalkan kewajiban pajaknya melalui cara yang tidak secara langsung melanggar hukum. Strategi ini memanfaatkan celah atau ketidaksempurnaan dalam sistem perpajakan. Menurut Hastuti dkk. (2022), penghindaran pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak melalui perencanaan pajak agresif, seperti pengalihan pendapatan, manipulasi harga transfer, atau pemanfaatan insentif pajak. Meskipun legal, praktik ini sering dianggap tidak etis karena merugikan penerimaan negara. Yunita dan Sihar (2024) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan hambatan dalam pemungutan pajak yang menyebabkan penurunan pendapatan pemerintah. Hal ini berdampak pada menurunnya kemampuan fiskal negara dalam menyediakan layanan publik dan pembangunan. Penghindaran pajak juga menciptakan ketidakadilan fiskal, karena beban pajak tidak terbagi secara merata antara wajib pajak yang patuh dan yang melakukan penghindaran. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan perpajakan yang efektif serta pengawasan ketat untuk menekan praktik tersebut. Pengukuran ini diperoleh dari beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak menggunakan rumus sebagai berikut Nadhifah et al., (2024)

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (1)$$

2.3. Konservatisme Akuntansi

Konservatisme akuntansi adalah prinsip kehati-hatian dalam penyusunan laporan keuangan, yang mengutamakan pengakuan terhadap kerugian atau beban lebih cepat dibandingkan pendapatan. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah laporan keuangan yang terlalu optimis, serta memberikan perlindungan terhadap risiko ekonomi di masa depan. Ellyanti dan Suwanti (2022) menyatakan bahwa dalam konservatisme akuntansi, laba tidak langsung diakui meskipun sudah diperoleh, sedangkan kerugian segera diakui meski belum terealisasi. Strategi ini sering digunakan sebagai upaya untuk mengurangi laba kena pajak sehingga kewajiban pajak juga menjadi lebih kecil. Menurut Glosarium Pernyataan Konsep No.2 FASB, konservatisme adalah reaksi kehati-hatian terhadap ketidakpastian dalam aktivitas bisnis guna memastikan bahwa risiko telah dipertimbangkan secara wajar (Rosdiani & Hidayat, 2020). Konservatisme akuntansi berperan penting dalam strategi penghindaran pajak karena memungkinkan perusahaan melaporkan laba yang lebih rendah secara legal, sehingga mengurangi beban pajak yang harus dibayar Nadhifah dkk (2024). Penerapan konservatisme akuntansi dapat diketahui melalui pengukuran dengan cara mengurangi laba bersih dengan arus kas operasi (Rudianti & Hermawan, 2023).

$$Akrual = \frac{\text{Laba} + \text{biaya penyusutan} - \text{kas operasi bersih}}{\text{Total Aset}} \quad (2)$$

2.4. Tata Kelola Perusahaan

Menurut (Ismanto, 2023), tata kelola perusahaan adalah sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengarahkan suatu perusahaan dengan cara yang transparan, akuntabel, serta menghargai hak-hak pemegang saham dan kepentingan seluruh stakeholder. Definisi ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan internal yaitu manajemen dan pemegang saham dan eksternal seperti karyawan, pelanggan, pemerintah, masyarakat, dan pihak lainnya yang terkait.

2.4.1. Komite Audit

Menurut (Fiska & Rusdi, 2020). Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan memiliki tugas utama membantu dalam melakukan pemeriksaan terhadap fungsi direksi. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit memiliki peran sebagai pengawas independen yang menjembatani hubungan antara auditor eksternal, manajemen, dan dewan komisaris guna menjamin bahwa pengelolaan perusahaan berjalan sesuai prinsip-prinsip akuntabilitas dan integritas. Keberadaan komite audit ditujukan untuk mendukung fungsi pengawasan dewan komisaris terhadap pelaksanaan tanggung jawab manajemen, terutama dalam hal pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan. Berikut rumus yang digunakan untuk mengukur komite audit Khomsiyah dkk., (2021).

$$KA = Total Komite Audit \quad (3)$$

2.4.2. Komisaris Independen

Fiska & Rusdi, (2020). Mendefinisikan komisaris independen sebagai Komisaris independen in- dividu yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi, dewan komisaris lainnya, maupun pemegang saham mayoritas perusahaan. Ketidakterkaitan ini memberikan jaminan bahwa komisaris independen dapat menjalankan fungsi pengawasannya tanpa adanya benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi inde- pendensinya dalam pengambilan keputusan. Pengukuran komisaris independen menggunakan rumus beri- kut Khomsiyah dkk., (2021)

$$DKI = \frac{Komisaris Independen}{Total Dewan Komisaris} \quad (4)$$

2.5. Leverage

Menurut Agustina dkk., (2023), *leverage* merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam struktur permodalannya. *Leverage* mencerminkan pro- porsi dana yang berasal dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio *leverage* suatu perusahaan, maka semakin besar pula ketergantungan perusahaan terhadap pembiayaan ber- basis utang, yang tercermin melalui meningkatnya rasio debt to equity. Pengukuran *leverage* ini menggunakan Debt to Ratio (DAR). Debt to Ratio didapat melalui proporsi antara total utang dan aset yang dimiliki perusahaan (Kasih dkk., (2023).

$$DAR = \frac{Total Debt}{Total Asset} 100\% \quad (5)$$

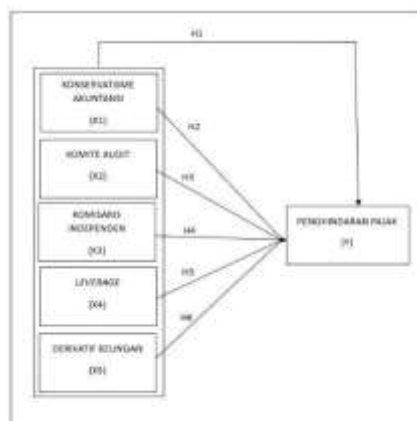
2.6. Derivatif Keuangan

Menurut Yunita & Sihar, (2024)) mengatakan bahwa Derivatif adalah kontrak keuangan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset/barang yang digunakan untuk tujuan komersial pada waktu dan harga yang sama yang disepakati antara penjual dan pembeli. lindung nilai (hedging), tetapi juga berpotensi digunakan untuk tujuan manipulatif yang berkaitan dengan perencanaan pajak secara agresif. Berikut rumus yang digunakan untuk mengukur derivatif keu- angan Yunita & Sihar, (2024).

$$DER = \frac{Nilai absolute fair value of derivative instrument}{Total Aset tahun t-1} \quad (6)$$

2.7. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah panduan berpikir logis yang menghubungkan teori dengan masalah penelitian yang sedang diteliti. Dalam penelitian, kerangka berpikir bertujuan untuk menunjukkan alur atau hubungan antara variabel yang diteliti, serta memberikan dasar yang kuat untuk memecahkan masalah penelitian. Kerangka penelitian diilustrasikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Konsep Kerangka Berfikir 1

2.8. Perumusan Hipotesis

Konservatisme akuntansi digunakan perusahaan untuk menekan laba dan menurunkan beban pajak, yang sejalan dengan kepentingan pemilik modal. Dalam kerangka teori keagenan, ini menjadi mekanisme untuk mengurangi potensi manipulasi laba oleh manajemen. Komite audit dan komisaris independen berfungsi sebagai pengawas independen untuk meminimalkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, serta mencegah tindakan oportunistik seperti penghindaran pajak. *Leverage* membatasi ruang gerak manajer dalam menggunakan dana secara tidak efisien, karena adanya pengawasan dari kreditor. Ini mendukung kontrol keuangan dalam hubungan keagenan. Penggunaan derivatif keuangan, meskipun bertujuan mengelola risiko, juga dapat dimanfaatkan manajemen untuk menyembunyikan beban atau laba, sehingga berpotensi digunakan untuk penghindaran pajak secara strategis. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Diasumsikan Variabel Konservatisme Akuntansi, Komite Audit, Komisaris Independen, *Leverage* dan Derivatif keuangan berpengaruh secara simultan terhadap Penghindaran Pajak

Konservatisme akuntansi adalah prinsip pelaporan keuangan yang mendorong pengakuan rugi atau beban lebih awal, namun menunda pengakuan pendapatan hingga benar-benar terealisasi. Tujuannya adalah untuk mencegah overstatement aset dan laba, serta menyajikan laporan keuangan yang lebih realistis (Nuryeni & Hidayati, 2021). Dalam teori agensi, terjadi konflik kepentingan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer). Prinsipal menginginkan laba tinggi karena mencerminkan kinerja dan meningkatkan penerimaan pajak negara. Sebaliknya, agen cenderung menekan laba guna meminimalkan beban pajak, salah satunya dengan menerapkan konservatisme akuntansi. Strategi ini dilakukan dengan mempercepat pengakuan beban dan menunda pendapatan, sehingga laba kena pajak menjadi lebih rendah dan kewajiban pajak dapat ditekan. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

H2: Diasumsikan Konservatisme Akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut (Purnomo & Bernawati, 2020) komite audit berperan strategis dalam tata kelola perusahaan dengan mengawasi efektivitas pengendalian internal, kepatuhan regulasi, dan integritas laporan keuangan. Keberadaan komite audit yang independen dan efektif dapat meningkatkan transparansi serta mencegah praktik manipulatif seperti penghindaran pajak. Dalam konteks teori agensi, komite audit bertindak sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik. Manajemen yang memiliki akses terhadap informasi cenderung bertindak oportunistik. Komite audit membantu mengawasi tindakan manajerial agar selaras dengan kepentingan pemilik, termasuk dalam mencegah strategi penghindaran pajak (Yudhistira & Anggraeni, 2022). Maka dapat dirumuskan sebagai berikut

H3: Diasumsikan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Menurut (Cahyani & Noviari, 2023) serta (Theresia, 2016), komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki keterikatan dengan pemegang saham pengendali maupun manajemen, sehingga mampu bertindak objektif dan netral. Peran ini penting dalam menjaga kepentingan seluruh pemegang saham secara adil. Dalam teori agensi, komisaris independen berfungsi sebagai mekanisme pengawasan eksternal untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan pemilik (prinsipal). Ketidakberpihakan komisaris independen memperkuat pengawasan terhadap tindakan oportunistik manajerial, seperti manipulasi laporan keuangan dan strategi penghindaran pajak. Proporsi komisaris independen yang lebih tinggi diyakini dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak (Wendy dkk., 2020). Maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4: Diasumsikan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Leverage mencerminkan sejauh mana perusahaan membiayai operasinya dengan utang dibandingkan modal sendiri. Rasio *leverage* yang tinggi menunjukkan ketergantungan besar terhadap pendanaan eksternal, yang meningkatkan kewajiban finansial, terutama pembayaran bunga. Dalam situasi ini, perusahaan mungkin terdorong melakukan strategi penghindaran pajak guna mempertahankan profitabilitas (Yudhistira & Anggraeni, 2022). Dalam teori agensi, struktur modal berbasis utang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara manajemen dan kreditor. Untuk menjaga stabilitas keuangan dan menghindari tekanan dari pemberi pinjaman, manajemen bisa bersikap oportunistik, seperti menyusun laporan keuangan yang menyesatkan atau menerapkan strategi pajak agresif. Oleh karena itu, *leverage* yang tinggi sering dikaitkan dengan meningkatnya risiko penghindaran pajak (Agustina dkk., 2023). Maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

H5: Diasumsikan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Derivatif merupakan kontrak keuangan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi atas suatu aset pada waktu dan harga yang telah disepakati sebelumnya. Instrumen ini digunakan untuk melindungi nilai maupun spekulasi terhadap pergerakan harga aset. Meskipun bertujuan mengelola risiko, sifat derivatif yang kompleks dan kurang transparan menimbulkan tantangan dalam hal akuntabilitas. Dalam teori agensi, penggunaan derivatif dapat

dimanfaatkan manajemen secara oportunistik, terutama karena asimetri informasi dengan pemegang saham. Derivatif yang digunakan secara agresif tanpa pengawasan memadai berpotensi menyembunyikan kinerja keuangan atau mengalihkan beban pajak ke periode atau entitas lain. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

H6: Diasumsikan derivatif keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak

3. Metode Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah Perusahaan Consumer cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 5 tahun yaitu mulai dari tahun 2019 – 2023. Pemilihan sampel dilakukan dengan purposive sampling method, artinya sampel diambil berdasarkan kriteria tertentu yaitu (1) Perusahaan sektor Consumer cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2019-2023 (2) Perusahaan sektor Consumer cyclical yang menyediakan laporan keuangan dengan lengkap selama periode tahun 2019- 2023. (3) Perusahaan sektor Consumer cyclical yang menerbitkan LPK dalam bentuk mata uang rupiah dan buka dollar selama periode 2019-2023. (4) Perusahaan sektor Consumer cyclical yang menghasilkan laba selama tahun 2019-2023. Sehingga telah menghasilkan jumlah data yang digunakan untuk sampel penelitian ini yaitu sebanyak 10 data.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Analisis Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data dari setiap variabel yang digunakan dalam model. Statistik deskriptif seperti nilai rata-rata (mean), nilai maksimum dan minimum, serta standar deviasi (Std. Dev) membantu menggambarkan sebaran dan variasi data yang diteliti (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini yang menganalisis pengaruh variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 terhadap Tax avoidance (Y), uji statistik deskriptif digunakan untuk memahami pola dan distribusi dari masing-masing variabel. Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang ditampilkan dalam Tabel 2, variabel Penghindaran Pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 0.2257 dengan standar deviasi 0.0469, yang menunjukkan tingkat variasi data yang rendah. Variabel konservatisme akuntansi memiliki mean sebesar -0.0254 dan standar deviasi 0.0908, mengindikasikan bahwa variabel ini memiliki variasi yang relatif rendah. Sementara itu, variabel komite audit memiliki nilai mean 3.3400 dan standar deviasi sebesar 0.5928, menunjukkan tingkat variasi data yang moderat. Variabel komisaris independen memiliki nilai rata-rata sebesar 0.4835 dengan standar deviasi 0.2543, menunjukkan bahwa terdapat variasi yang cukup tinggi dalam data. Variabel *leverage* memiliki nilai mean sebesar 0.2855 dan standar deviasi 0.0440, mengindikasikan adanya variasi data yang rendah. Terakhir, variabel derivatif keuangan memiliki mean sebesar 0.0611 dan standar deviasi 0.0637, yang menunjukkan tingkat variasi data yang relatif sedang.

	Y	X1	X2	X3	X4	X5
<i>Mean</i>	0.2257	-0.0254	3.3400	0.4835	0.2855	0.0611
<i>Median</i>	0.2199	-0.0216	3.0000	0.4142	0.2411	0.0330
<i>Maximum</i>	0.3477	-0.2157	5.0000	0.4142	0.6771	0.2238
<i>Minimum</i>	0.1230	-0.2944	3.0000	2.0000	0.0440	0.0010
<i>Std. Dev</i>	0.0469	0.0908	0.5928	0.2543	0.0440	0.0637
<i>Observation</i>	50	50	50	50	50	50

4.2. Uji Pemilihan Model

a) Uji Chow

Cross-section F	0.2361
Cross-section Chi Square	0.0870

Sumber : Output E-Views 12, 2025

Berdasarkan hasil Uji Chow data pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai probabilitas Chi-square lebih besar dari 0.05 ($0.0870 > 0.05$), maka artinya H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa data yang dihasilkan dari hasil uji chow adalah common effect model.

b) Uji Lagrange Multiplier (LM)

Breusch-Pagan	0.9026
---------------	--------

Sumber : Output E-views12, 2025

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam Tabel 4.3, nilai Cross-Section Breusch-Pagan yang diperoleh adalah 0,9026, yang berarti tingkat signifikansi ($0,9026 < 0,05$) lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_1) ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model Common effect merupakan model yang lebih tepat untuk digunakan dalam konteks pengujian ini.

4.3. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

<i>Standardized Residuals</i>	
Jarque-Bera	0.259416
Probability	0.87832

Berdasarkan hasil uji normalitas yang disajikan pada Tabel 4 diperoleh nilai signifikansi sebesar ($0,878352 > 0,05$), yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

b) Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya korelasi tinggi atau sempurna antar variabel independen dalam suatu model regresi. Suatu model dianggap memenuhi syarat yang baik apabila tidak ditemukan korelasi antar variabel independen. Hasil pengujian multikolinearitas pada data penelitian ini disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4 1

	KA	KOMDIT	KOMIS	LEV	DRV
KA	1.000000	0.074154	-0.215957	-0.157503	0.23121
KOMDIT	0.074154	1.000000	-0.102700	0.080295	0.15477
KOMISARIS	-0.215957	-0.102700	1.000000	-0.029068	-0.12355
LEV	-0.157503	0.080295	-0.029068	1.000000	-0.10739
DRV	0.231218	0.154777	-0.123552	-0.107391	1.00000

Tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai koefisien di bawah 0,8. Temuan ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat permasalahan multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui adanya ketidakkonsistenan varians residual dalam model regresi, dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika probabilitas Chi-Square $> 0,05$, maka model dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas. Hasil pengujian disajikan sebagai berikut:

<i>Heteroskedasticity Test (Glesjer Test)</i>	
Prob. Chi-Square	0.2980

Mengacu pada hasil pengolahan data pada Tabel 4.12, diperoleh nilai Probabilitas Chi-Square sebesar 0.2980. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ditemukan indikasi adanya masalah heteroskedastisitas dalam model.

d) Uji Autokorelasi

Autocorelation Test	
Durbin-Watson Statistic	1.705161
Prob (F-statistic)	0.000315

Merujuk pada Tabel diatas hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1.705161. Hal ini dapat disimpulkan tidak terdapat masalah autokorelasi karena nilai Durbin Watson sebesar 1.705161 berada di wilayah -2 sampai +2 yang merupakan wilayah tidak terjadinya autokorelasi.

4.4 Uji Hipotesis

a) Uji Koefisiensi Determinasi (R^2) & Uji Simultan (Uji F)

Uji Koefisiensi Determination (R^2) & Simulation (Uji F)	
Adjusted R-squared	0.331180
F-Statistik	5.85266
Prob (F-statistic)	0.00315

Hasil analisis regresi dari tabel di atas dapat diketahui koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.331180. Hal tersebut berartikan 33% Penghindaran Pajak dapat dijelaskan oleh seluruh variabel independen, sedangkan penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh faktor—faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian ini sebesar 67%.

b) Uji Simultan (Uji F)

Hasil uji F menunjukkan nilai Fhitung sebesar 5,85266 dengan signifikansi 0,00315. Dengan $n = 50$ dan $k = 5$, diperoleh $df_1 = 4$ dan $df_2 = 45$, sehingga F_{tabel} sebesar 2,422. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$, maka H_1 diterima. Artinya, secara simultan konservatisme akuntansi, komite audit, komisaris independen, *leverage*, dan derivatif keuangan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor Consumer cyclical yang terdaftar di BEI periode 2019–2023. Dengan demikian, H_1 diterima.

c) Uji Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	0.204307	0.035210	5.802503	0.0000
KA	0.245014	0.064016	3.827479	0.0004
KOMDIT	-0.004049	0.009451	-0.428363	0.6705
KOMISARIS	0.015234	0.022270	0.684041	0.4975
LEV	0.146729	0.035304	4.156218	0.0001
DRV	-0.132494	0.090976	-1.474189	0.1476

Perhitungan Tabel : $df = n - k$ yaitu $50 - 5 = 45 = 2.41212$, berdasarkan hasil pada tabel diatas, hasil uji parsial (uji t) hasil perhitungan dengan menggunakan eviiew versi 12 for windows dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Uji t statistik pada variabel konservatisme akuntansi menunjukkan menghasilkan thitung 3,827 > ttabel 2,412 dan signifikansi 0,0004 < 0,05, sehingga H_2 diterima. Konservatisme akuntansi secara signifikan memengaruhi penghindaran pajak, di mana prinsip kehati-hatian dalam pencatatan laba menurunkan laba kena pajak secara legal. Manajemen memanfaatkan prinsip ini untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan nilai perusahaan. Hasil ini sejalan dengan Hasnita dkk. (2023), namun berbeda dengan Sari dkk. (2022) yang menemukan tidak adanya pengaruh signifikan.

- b. Hasil uji t statistik pada variabel Komite Audit menunjukkan thitung $-0,428 < t_{tabel} 2,412$ dan signifikansi $0,670 > 0,05$, sehingga H3 ditolak. Artinya, komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya keahlian teknis, keterlibatan aktif, atau efektivitas pengawasan dalam isu perpajakan. Hasil ini konsisten dengan Kasih dkk. (2023), namun berbeda dengan (Murtina et al., 2022).
- c. Uji t statistik pada variabel komisaris independen menunjukkan thitung $0,684 < t_{tabel} 2,412$ dan signifikansi $0,4975 > 0,05$, sehingga H4 ditolak. Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum berjalan optimal karena kurangnya keterlibatan dalam kebijakan strategis dan isu perpajakan. Temuan ini sejalan dengan Kasih dkk. (2023), namun bertentangan dengan Khomsiyah dkk. (2021).
- d. Uji t pada variabel *Leverage* menghasilkan thitung $4,156 > t_{tabel} 2,142$ dan signifikansi $0,0001 < 0,05$, sehingga H5 diterima. *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penggunaan utang menciptakan beban bunga yang dapat mengurangi laba kena pajak, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak sebagai strategi efisiensi. Temuan ini mendukung studi Khomsiyah dkk. (2021), namun berbeda dengan Praiwita dkk. (2023).
- e. Uji t pada variabel Derivatif Keuangan menunjukkan thitung $-1,474 < t_{tabel} 2,142$ dan signifikansi $0,1476 > 0,05$, sehingga H6 ditolak. Derivatif keuangan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Meskipun derivatif digunakan untuk manajemen risiko dan pengelolaan arus kas, hasil menunjukkan bahwa instrumen ini tidak dimanfaatkan secara signifikan dalam strategi penghindaran pajak. Hasil ini sejalan dengan Luh Nadi & Amelia (2024), namun berbeda dengan Rosdiani & Hidayat (2020).

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait pengaruh Konservatisme Akuntansi, Komite Audit, Komisaris Independen, *Leverage*, dan Derivatif Keuangan terhadap praktik Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor Consumer cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023, dapat disimpulkan bahwa secara parsial, hanya Konservatisme Akuntansi dan *Leverage* yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Sementara itu, Komite Audit, Komisaris Independen, dan penggunaan Derivatif Keuangan tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial. Namun, hasil analisis simultan menunjukkan bahwa kelima variabel tersebut secara bersama-sama (*simultan*) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Walaupun Komite Audit, Komisaris Independen, dan Derivatif Keuangan tidak berpengaruh secara parsial, ketiganya tetap memiliki peranan penting dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan. Hal serupa berlaku bagi kualitas audit dan konservatisme akuntansi, yang meskipun tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial, tetap memiliki nilai strategis dalam menciptakan transparansi dan keandalan laporan keuangan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar ruang lingkup diperluas dengan memasukkan variabel tambahan yang berpotensi memengaruhi Penghindaran Pajak, seperti pertumbuhan penjualan (*Sales Growth*), kebijakan perpajakan yang lebih rinci, atau karakteristik khusus perusahaan lainnya yang belum dijelajahi dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian juga dapat menggunakan jumlah sampel yang lebih besar atau memperluas cakupan sektor industri yang dikaji. Sebagai implikasi dari penelitian ini, perusahaan disarankan untuk lebih cermat dalam mengelola kebijakan modal dan strategi perencanaan pajak guna menghindari praktik penghindaran pajak yang melanggar aturan hukum.

Referensi

- 1) Agustina, I., Epianto, I., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh *Leverage* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode Tahun 2017 - 2021. *Jurnal Economina*, 2(2), 464–475. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.322>
- 2) Cahyani, N. P. B. I., & Noviani, N. (2023). Manajemen Laba, Sales Growth, Good Corporate Governance dan Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(11), 2981–2995. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i11.p12>
- 3) Ellyanti, R. S., & Suwanti, T. (2022). Analisis Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Corporate Governance, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance (Studi Terhadap Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2018-2020). *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, 19(01), 118–128. <https://doi.org/10.25134/equi.v19i01.5032>
- 4) Fiska, A., & Rusdi, D. (2020). PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016- 2018). *Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU)* 3, 3, 490–512.
- 5) Ismanto, J. (2023). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Pertumbuhan Penjualan Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Lentera Akuntansi*, 8(1), 35. <https://doi.org/10.34127/jrakt.v8i1.784>
- 6) Kasih, P. A., Sastrodiharjo, I., & Mukti, A. H. (2023). Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris perusahaan Sub Sektor Consumer Cyclical yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(3), 1–17. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat>
- 7) Khomsiyah, N., Muttaqin, N., & Katias, P. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014-2018. *Ecopreneur*, 12, 4(1), 1. <https://doi.org/10.51804/econ12.v4i1.917>

- 8) Luh Nadi, & Amelia, N. (2024). Pengaruh thin capitalization, transfer pricing, dan derivatif Keuangan terhadap tax avoidance. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 4(4), 1–33. 10.8734/mnmae.v1i2.359
- 9) Murtina, W. S., Putra, W. E., & Yustien, R. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Perusahaan Perbankan Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 17(2), 47–66. <https://doi.org/10.14710/jaa.17.2.47-66>
- 10) Nadhifah, A., Lisvianih, A., Putri, M. D., & Haryati, S. (2024). PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Properti Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022). *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa (PIM)*, 4(2).
- 11) Purnomo, H., & Bernawati, Y. (2020). Pengaruh Efektivitas Komite Audit, Efektivitas Internal Audit dan Kualitas Auditor terhadap Pengungkapan Sukarela. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(4), 861. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i04.p05>
- 12) Rachyu Purbowati. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Dewantara*, 4(1), 61–76. <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59>
- 13) Rosdiani, N., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Derivatif Keuangan, Konservatisme Akuntansi dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 1(2), 131–143. <https://doi.org/10.37195/jtebr.v1i2.43>
- 14) Rudianti, E., & Hermawan, S. (2023). Accounting Conservatism, Capital Intensity, Financial Distress, and Tax Avoidance in Manufacturing. *Academia Open*, 8(1), 1–22. <https://doi.org/10.21070/acopen.8.2023.3643>
- 15) Theresia, Y. H. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). 17(2), 1–23.
- 16) Wahyudi, I., & Rustinawati, S. (2020). Pengaruh Tata kelola Perusahaan, *Leverage* dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance.. *Jurnal Riset Perbankan Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1). <http://www.jrpma.sps-perbanas.ac.id/index.php/jrpma/article/view/59/46>
- 17) Yudhistira, A., & Anggraeni, F. (2022).). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Rasio Keuangan, Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Ali. National Conference on Accounting and Fraud Auditing*, 3(1).
- 18) Yunita, & Sihar, T. (2024). Pengaruh Earnings Management dan Derivatif Keuangan Terhadap Tax Avoidance Dengan GCG Sebagai Pemoderasi. *Journal Akuntansi Manajerial ISSN (E)*, 9(1), 51–66. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/JAM/index>